

Perempuan, media dan profesi jurnalis

Yolanda Stellarosa¹ dan Martha Warta Silaban²

^{1,2}LSPR, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Tahun 2018, reformasi di Tanah Air memasuki usia 20 tahun. Era di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi hadir hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pada pekerja media. Namun, kondisi ini rupanya tidak sepenuhnya dialami jurnalis perempuan. Sebagian besar dari mereka masih mengalami diskriminasi di organisasi tempat bekerja dan saat bertugas di lapangan. Standarisasi jurnalis perempuan di setiap media belum sama. Semua itu tergantung pada kebijakan masing-masing redaksi. Pandangan bahwa pekerjaan ini lebih cocok untuk laki-laki, masih tampak dengan lebih banyak jumlah jurnalis pria dibandingkan perempuan. Penelitian ini ingin melihat perbedaan perlakuan perusahaan media terhadap jurnalis perempuan di dunia kerja dan bagaimana jurnalis perempuan berupaya untuk memperjuangkan nasibnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada tiga jurnalis perempuan dari tiga media cetak nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis laki-laki masih dominan dibandingkan perempuan di sektor media, dan sedikitnya jurnalis perempuan yang berada di jajaran puncak manajemen. Perbedaan perlakuan dalam hal fasilitas pekerjaan pun masih dijumpai, misalnya saja, fasilitas kesehatan, tunjangan keluarga yang dikaitkan dengan status *single* walaupun sudah berkeluarga, dan penyediaan ruang laktasi. Walaupun gerakan memperjuangkan kesetaraan gender di sektor media telah dilakukan oleh para jurnalis perempuan ini, akan tetapi budaya patriarki yang masih tertanam lekat membuat para jurnalis perempuan terutama yang telah menikah kehilangan semangat dan profesionalisme untuk menuju jajaran puncak.

Kata-kata Kunci: *gender*; kesetaraan; media; perempuan; profesi jurnalis

Women, media and journalists

ABSTRACT

It has been 20 years since reforms began in Indonesia. An era in which freedom of opinion and expression is present in almost every corner of Indonesian society, media workers are no exception. But this condition is not entirely experienced by female journalists. Most of them still experience discrimination in the organization where they work. The standardization of female journalists in each media is not the same. Because it depends on the policy of each editor. The view that this work is more suitable for men is still apparent with more male journalists than women.. This study wants to see the differences between media companies' treatment of women journalists in the world of work and how women journalists try to fight for their fate. This research uses a descriptive qualitative method by interviewing three journalists from three national print media. The results showed that male journalists were still dominant compared to women in the media sector and there were at least female journalists in the top management ranks. Differences in treatment regarding employment facilities are still found, for example, health facilities, family allowances obtained are associated with single status even though they are married, and the provision of lactation space. Although these movements to fight for gender equality in the media sector have been carried out by these women journalists, patriarchal culture that is still embedded in makes women journalists, especially those who are married, lose their enthusiasm and professionalism to reach the top ranks.

Keywords: *equality; gender; journalist; media; women*

Korespondensi: Dr. Yolanda Stellarosa, M.Si. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR. STIKOM LSPR Campus C, Sudirman Park, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220 Indonesia. *Email:* yolanda.s@lspr.edu

PENDAHULUAN

Tahun 2018, perjalanan reformasi Indonesia genap berusia 20 tahun. Ini adalah suatu kondisi kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat hadir setelah runtuhnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama 34 tahun, media dikontrol dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Siapa pun yang bertentangan dengan pemerintah, bisa kapan pun dicabut SIUPP nya oleh Menteri Penerangan (Bachyul, Saputra, & Khagen, 2013).

Namun sejak reformasi pada 1998, SIUPP tak berlaku lagi. Siapa pun dapat mendirikan media baik konvensional maupun *online*. Bak jamur dalam cendawan, kini jumlah media di Indonesia berlimpah. Data Dewan Pers menyebutkan sampai tahun 2017, media di Indonesia mencapai jumlah 2000 cetak. Sedangkan media siber mencapai angka 43.300, 1.160 media radio, dan 394 media televisi (World Press Freedom Day 2017, 2017)

Sebagai sebuah organisasi, media terdiri dari divisi redaksi yang di dalamnya ada jurnalis perempuan dan laki-laki. Keduanya secara bersama-sama bertugas mencari bahan liputan dan menyampaikannya ke publik. Namun, meski tugas dan tanggung jawabnya sama, diskriminasi terhadap jurnalis perempuan masih terjadi di banyak media. Standarisasi jurnalis perempuan di setiap media di Tanah Air belum sama. Semua itu tergantung pada kebijakan masing-masing redaksi.

Ketimpangan dan diskriminasi yang masih ditemui di bidang media massa, menurut sebagian kalangan feminis, diciptakan oleh masyarakat patriarki yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi laki-laki (Hidajadi, 2003). Media sampai saat ini masih dianggap melanggengkan stereotip yang merugikan perempuan.

Bias gender dalam media massa dapat terlihat dari bagaimana media massa menampilkan sosok perempuan yang dimarginalkan dan disubordinasikan. Dikaitkan dengan *muted group theory* atau teori kelompok yang dibungkam, dapat dilihat bagaimana praktik komunikasi kelompok dominan dapat menindas, membungkam atau mendevalusi kata, ide dan diskursus kelompok subordinat. Pembatasan ide atau suara dari kelompok luar menjadi cara kelompok sosial ini menciptakan

dan mempertahankan dominasi. Dalam hal ini, anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang pasif (Littlejohn & Foss, 2016).

Asumsi dasar dari teori kelompok yang dibungkam adalah sebagai berikut: 1) perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena adanya perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berakar pada pembagian pekerjaan; 2) dilihat dari dominasi politiknya, pria memiliki sistem persepsi yang dominan, yang dapat menghambat ekspresi bebas dari perempuan mengenai dunia; 3) agar dapat berpartisipasi di dalam masyarakat, maka perempuan harus dapat mengubah perspektif sesuai dengan sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki. Permasalahan yang timbul bukan karena ketidakmampuan perempuan tetapi tidak responsifnya perempuan untuk mengekspresikan dirinya (West & Turner, 2008).

Dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional 2016, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyoroti praktik diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di media. Aliansi Jurnalis Independen menyerukan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja media dan jurnalis perempuan di media. Banyak media yang belum memenuhi hak maternitas pekerja perempuan di media, terutama cuti haid dan ruang laktasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan hak cuti haid dua hari bagi pekerja perempuan (Adenia, 2017).

Ketentuan tentang ruang laktasi juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan pasal 128 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Adenia, 2017). Dalam laporan Akhir Tahun 2015, Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menyatakan gambaran secara umum kondisi kesejahteraan jurnalis (pekerja media) perempuan masih jauh dari harapan. Perempuan di media berada satu *level* di bawah mitranya. Salah satu indikasinya, banyak jurnalis perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak, ditempatkan pada status karyawan sebagai *single*. Implikasi penetapan status *single* adalah tidak terpenuhinya sebagian hak-hak pekerja atau jurnalis perempuan, misalnya hak untuk mendapatkan fasilitas tunjangan keluarga, ataupun asuransi kesehatan untuk suami dan anak (Wulandari, 2016).

Diskriminasi ini terjadi karena banyak media menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam hal pengupahan untuk pekerja perempuan, termasuk di media. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hal inilah yang sering kali diberlakukan kepada pekerja perempuan sehubungan dengan tunjangan keluarga yang diberikan meskipun pekerja perempuannya sebagai kepala keluarga.

Semestinya media menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Realitasnya, hanya sedikit media yang menjalankan amanat konstitusi ini, seperti media Kompas dan Tempo. Selain itu, hak mendapatkan fasilitas seperti yang diamanatkan UU Kesehatan juga belum tersedia sepenuhnya. Salah satunya adalah pengadaan ruang laktasi di tempat kerja. Kondisi ini terjadi di banyak media, termasuk di beberapa media *mainstream*, misalnya saja Kompas yang sudah memberikan cuti melahirkan dan cuti haid bagi pekerja perempuan serta menyediakan ruang laktasi (Luviana, 2012). Penyediaan ruang laktasi ini di beberapa perusahaan media, ada yang tidak memenuhi syarat aksesibilitas ataupun kenyamanan karena posisi ruang laktasi atau jumlahnya tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan (Wulandari, 2016).

Isu pelecehan seksual di tempat kerja juga belum bergeser, misalnya saja pelecehan dari narasumber ketika melakukan liputan di lapangan, mengajak berkencan, pelecehan oleh oknum aparat polisi ketika melakukan peliputan di kepolisian dan sebagainya (Luviana, 2012). Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya langsung pada atasan. Kondisi ini menjadi sulit ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasannya sendiri atau jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat peliputan (Wulandari, 2016).

Kasus kekerasan atau pelecehan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan ini sebenarnya dapat diadukan ke Dewan Pers sebagai lembaga yang mengawasi profesi wartawan. Terdapat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers untuk memberikan perlindungan bagi wartawan

di Indonesia melalui Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008; dimana salah satu peraturannya menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun (Komala, 2018).

Ketika bicara mengenai konsep gender, tentu akan berbeda dengan seks. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat secara sosial maupun kultural. Sifat gender tersebut dapat dipertukarkan. Berbeda dengan seks yang tidak dapat dipertukarkan, karena kodrat Tuhan dan berkaitan dengan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Fakih, 2013).

Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial maupun kultural, seperti perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah lembut, cantik, emosional, keibuan dan sebagainya. Sementara, laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Akan tetapi, sifat ini tidaklah mutlak, karena ada juga perempuan yang kuat dan rasional sedangkan ada pula laki-laki yang lemah lembut dan emosional. Hal ini dapat kita lihat pula dari zaman dan kelas masyarakat, misalnya pada zaman dan suku tertentu yang perempuan lebih kuat dari laki-laki. Dengan demikian, sifat perempuan dan laki-laki ini dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu, sesuai tempat dan kelas masyarakat (Fakih, 2013).

Dalam konteks perbedaan gender, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu 1) ketidakadilan dan diskriminasi gender, hal ini berkaitan dengan berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung berupa dampak perundangan maupun kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam adat, norma maupun struktur dalam masyarakat; 2) kesetaraan dan keadilan gender, berkaitan dengan status dan dapat memiliki kondisi yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan sebagainya (Lampe, 2010).

Perbedaan gender yang dikaitkan dengan pengelolaan media, berdasarkan hasil penelitian terakhir yang dilakukan Aliansi

Jurnalis Independen (AJI), pada sebuah kantor pengelola radio pemerintah, menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Ketimpangan terjadi tidak hanya pada jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak dari jumlah perempuan, dimana 45 persen pegawai adalah perempuan dan 55 persen adalah laki-laki, akan tetapi juga pada penetapan status kontrak, yang berdampak pada kesempatan jenjang karier yang terbatas untuk perempuan. Begitu juga dalam posisi di struktural; dari 900 jabatan struktural, perempuan mengisi sekitar 300 jabatan struktural, dominan pada level administratif. Jika menunjuk pada program nasional keterwakilan perempuan, kondisi ini berada sedikit lebih tinggi di atas batas minimum atau *critical mass* keterwakilan perempuan di wilayah politik (Wulandari, 2016).

Minimnya jumlah perempuan dalam pengelolaan dan kepemilikan media juga terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Amerika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Byerly menunjukkan bahwa kurang dari enam persen perempuan yang mengelola dan memiliki media seperti stasiun radio dan televisi (Byerly, 2011).

Pada pengelolaan media surat kabar, penelitian yang dilakukan oleh Lampe mengenai perempuan dalam pengelolaan surat kabar di Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih rendah yaitu sebesar 15,27 persen dan kebanyakan perempuan pekerja media hanya ditempatkan pada bagian administrasi, promosi dan periklanan (Lampe, 2010).

Kebijakan nasional pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 2000, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini dilatarbelakangi pandangan perlunya upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan. Serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Wulandari, 2016).

Namun, 16 tahun sejak Inpres ditetapkan, tak banyak perubahan terjadi. Bagi jurnalis perempuan di Indonesia, masalah masih berada di kisaran upah dan kesempatan yang setara dengan mitranya. Sementara isu hak perempuan seperti perlindungan dari pelecehan seksual di

kantor masih banyak diabaikan. Keberadaan serikat pekerja masih belum maksimal mengakomodir isu-isu jurnalis perempuan (Wulandari, 2016).

Dengan serangkaian permasalahan yang masih banyak dihadapi jurnalis perempuan ini, masih banyak yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis perempuan di Indonesia. Atas berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis perempuan, Aliansi Jurnalis Indonesia pernah menyampaikan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang (Wulandari, 2016). Selain itu digalakkannya praktik jurnalisme dengan perspektif gender dapat dijadikan upaya pembenahan media yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan gender. Seperti dilakukan jurnalis Maria Hartiningsih dalam tulisan-tulisannya (Winarti, 2005).

Pada tataran teks, tulisan-tulisan Maria Hartiningsih yang dimuat di harian Kompas sudah menyoroti masalah perempuan, anak jalanan dan kemiskinan (Ritonga, Muwarni & Ritonga, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Gumelar yang menyatakan bahwa dengan memperbanyak tokoh atau aktivis yang berbicara di media cetak maupun elektronik sebagai sebuah emansipator dalam kebebasan wanita, dapat memberikan ruang pencerahan untuk melakukan kehendaknya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya (Gumelar, 2015)

Menyikapi diskriminasi yang masih terus berlangsung pada jurnalis perempuan, pada hari Kartini 21 April 2016, jurnalis perempuan Bengkulu yang tergabung dalam Jurnalis Perempuan Rafflesia menyampaikan tuntutan, yaitu: Pertama, meminta agar diberi kesempatan jenjang karier. Kedua, diberi ruang yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Ketiga, diberi porsi untuk peliputan isu yang berkaitan dengan perempuan. Keempat, diberi ruang untuk menggunakan narasumber perempuan. Kelima, diberi jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, diberi hak cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya hak cuti melahirkan. Ketujuh, diberi kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan

untuk meningkatkan kapasitas diri (Julikawati, 2016).

Hasil survei Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Indonesia pada 2012 menunjukkan dari 10 jurnalis pria hanya ada dua sampai tiga jurnalis perempuan. Artinya jika ada 1000 jurnalis, maka 200-300 orang adalah perempuan. Dengan kekhususan di Jakarta adalah 60:40 (laki-laki:perempuan). Di luar kota Jakarta, terutama di kota-kota madya, ketimpangan jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki sangat terasa dan memprihatinkan. Begitu pun dengan status kepegawaiannya (Luviana, 2012).

Data menunjukkan, sekitar 60 persen jurnalis perempuan bekerja sebagai pekerja kontrak, sisanya atau 40 persen berstatus pegawai tetap. Yang mengejutkan, jumlah pekerja perempuan berstatus kontrak justru lebih banyak di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar (Luviana, 2012). Jumlah sumber daya manusia yang tertinggal ini berdampak kepada kedudukan jurnalis perempuan di ruang redaksi. Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan, hanya enam persen jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi redaksi. Artinya, 94 persen atau mayoritas jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter, namun bukan di bagian pengambil keputusan redaksional. Hal ini membuat banyak kebijakan media kurang ramah terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam tugas peliputan dan masalah pengupahan (Luviana, 2012).

Dari survei ini ditemukan, agar kesejahteraan jurnalis perempuan dapat setara dengan jurnalis laki-laki, banyak yang menunda untuk menikah. Pertimbangan lainnya adalah jurnalis perempuan tidak mendapatkan penilaian yang baik dari atasan mereka ketika harus berkuat dengan proses reproduksi seperti kehamilan. Di luar itu, kesadaran tentang kesetaraan gender di kalangan jurnalis perempuan pun masih rendah, hanya 17 persen jurnalis perempuan yang pernah mengikuti pelatihan isu gender. Hal ini membuat kesadaran tentang masalah kesetaraan gender perlu ditingkatkan (Luviana, 2012).

Dari gambaran di atas muncul kesan, dunia media dan profesi jurnalistik itu adalah dunia kaum laki-laki. Sebagian besar para jurnalis yang dikenal publik adalah laki-laki. Bagi pekerja perempuan, lebih banyak ditempatkan sebagai *presenter* studio, atau sebagai redaktur yang duduk manis di belakang seperangkat

komputer. Dalam industri televisi, pekerja perempuan biasanya lebih dekat ke peralatan kecantikan atau *make-up* ketimbang ke peralatan liputan, dimana profesi sebagai *presenter* dianggap lebih prestisius dibandingkan jurnalis perempuan di lapangan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Lampe yang menyatakan bahwa wartawan perempuan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya lebih banyak ditempatkan pada desk yang dianggap lunak seperti hiburan, ekonomi, iptek, pendidikan dan budaya (Lampe, 2010).

Penelitian terhadap perempuan pekerja media di Jawa Barat, menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik sering berhadapan dengan pandangan bias gender yang lebih menempatkan peran perempuan di ranah domestik. Pekerjaan media umumnya dipandang sebagai pekerjaan laki-laki. Perempuan pekerja media berada di dunia yang maskulin (Herawati, 2016).

Hasil penelitian Herawati menemukan bahwa perempuan pekerja media memaknai dirinya sebagai 1) perempuan yang memiliki perbedaan dengan laki-laki akan tetapi tidak dimaknai negatif; 2) sebagai perempuan sama dan setara dengan laki-laki; 3) sebagai perempuan diperlakukan adil dalam dalam keluarga dan sekolah atau pendidikan; 4) memaknai dirinya lebih kuat atau memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki di sekitarnya; 5) memandang bahwa mengurus anak adalah tugas perempuan dan 6) keluarga menjadi prioritas utama bila terjadi benturan dalam pekerjaan, sehingga akan memilih keluar pekerjaannya (Herawati, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengenai perempuan dan profesi jurnalis media cetak khususnya dilihat dari perbedaan perlakuan perusahaan media terhadap jurnalis perempuan menjadi suatu hal yang tetap menarik untuk diteliti. Seiring dengan usia reformasi yang sudah menginjak 20 tahun, penelitian ini akan melihat apakah masih banyak ditemukan perbedaan perlakuan perusahaan media terhadap jurnalis perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan perusahaan media terhadap jurnalis perempuan di dunia kerja, seperti fasilitas dan jenjang karier serta upaya apa yang dilakukan jurnalis perempuan dalam memperjuangkan hak dan nasibnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merujuk pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata serta melakukan observasi perilaku secara mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan asumsi filosofis, strategi, metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi yang berbeda. (Cresswell, 2015). Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan; dengan menggunakan kata-kata atau angka (Neuman, 2013).

Teknik pengumpulan data wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang utama selain menggunakan studi *literature* seperti buku, jurnal, berita *online*; sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Wawancara berlangsung dengan semi terstruktur dimana ada panduan wawancara yang dibuat dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Pemilihan narasumber atau informan dilakukan secara purposif, dimana difokuskan pada jurnalis perempuan dengan masa kerja minimal tiga tahun dari media cetak surat kabar yang memiliki jangkauan distribusi nasional. Narasumber dari penelitian ini adalah tiga jurnalis perempuan yaitu PS dari Koran Sindo, yang telah menjadi jurnalis selama 14 tahun dan bergabung sebagai wartawan Koran Sindo selama 13 tahun; KM dari Koran Kompas, yang telah menjadi jurnalis selama 15 tahun dan bergabung sebagai wartawan Koran Kompas selama 12 tahun; serta RKA dari Koran Jawa Pos, yang telah menjadi jurnalis selama 15 tahun.

Pada wawancara ini, informan diberikan sejumlah pertanyaan yang mengacu pada tujuan penelitian mengenai bagaimana perlakuan media terhadap para jurnalis perempuan ini di dunia kerja terutama berkaitan dengan fasilitas yang didapatkan serta jenjang karier serta melihat apakah terdapat perbedaan perlakuan antara jurnalis perempuan dan laki-laki di masing-masing organisasi surat kabar cetak ini. Selain itu, diajukan pertanyaan bagaimana para jurnalis perempuan ini dalam memperjuangkan nasib atau haknya di dunia kerja.

Data yang diperoleh dianalisis

menggunakan teknik analisis data interaktif Miles & Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif yaitu berupa 1) reduksi data, dimana di tahap ini dilakukan proses reduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu; 2) penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun teks yang bersifat naratif; dan 3) penarikan kesimpulan, diharapkan adanya temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek (Sugiyono, 2009). Lokasi penelitian terletak di Jakarta dan dilakukan selama lima bulan dimulai dari bulan Maret-Juli 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mewawancarai tiga jurnalis dari media surat kabar yang berbeda. PS memulai karier sebagai jurnalis pada 2004 di Tabloid Nova. Di sana, ia banyak meliput tentang artis dan membuat tulisan *feature*, karena Nova juga mengangkat isu tentang kemanusiaan atau *human interest*.

PS kemudian pindah ke Koran Sindo tahun 2005. Hingga kini, ia menjabat sebagai editor rubrik gaya hidup. Adapun PS ketika memulai karier sebagai jurnalis, sempat tidak mendapat restu dari ayahnya sebagai mantan jurnalis, karena khawatir akan sulit membagi waktu dengan keluarga dan anak-anaknya ke depan. Namun PS berhasil meyakinkan ayahnya. Antara lain juga, karena tidak kerasan ketika mencoba bekerja sebagai *supervisor* di Toko Buku Gramedia.

Di awal menjadi reporter Koran Sindo, PS bertugas di rubrik Nasional. Dengan waktu kerja dari jam 8 pagi sudah meliput di Kantor Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kuningan, dan bisa pulang jam 1 malam. Seperti yang dikatakannya:

Saya *ngepos* atau bertugas di KPK, Pengadilan Tinggi Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Itu sekitar 2 tahun. Sampai 2007. Itu pengalaman menyenangkan juga di wartawan nasional *desk* hukum karena kita harus *standby* di KPK jam 8 pagi dan pulang jam 1 malam.

PS juga menceritakan pengalamannya ketika mewawancarai khusus pengusaha Probosutedjo di rumahnya di kawasan Menteng. Hal tersebut merupakan pengalaman yang tidak

terlupakan, karena berhasil mewawancarai Probosutedjo secara eksklusif di rumahnya. Bahkan wawancara ulang lagi di Hotel Le Meridien keesokan harinya, setelah berita wawancara pertama tayang di halaman satu Koran Sindo.

Setelah menikah dan dikaruniai anak pada awal 2007, mengajukan pindah *desk* ke rubrik gaya hidup. Pertimbangannya, karena waktu lebih fleksibel untuk membina keluarga dibandingkan bertugas di rubrik nasional. Secara umum, dengan pola kerja seperti itu maka dapat kembali ke rumah sekitar pukul 19.00 setiap harinya. Waktu liputan sekitar pukul 10.00-12.00 atau karena ada rapat di kantor. Dilanjutkan dengan *editing* naskah berita.

Pada awal kepindahannya ke *desk* gaya hidup, sempat merasa tidak nyaman, karena merasa 'banci' dan karya jurnalistiknya tidak lagi masuk halaman satu di Koran Sindo. Sebagai wartawan yang awal kariernya di Sindo adalah liputan 'keras' di rubrik nasional, harus pindah ke *desk* gaya hidup yang notabene sering kali dianggap warga kelas dua di Koran Nasional.

Namun, setelah melewati masa satu tahun kepindahannya ke *desk* gaya hidup, PS dapat menikmati pekerjaannya. Ia sesekali masih menjalankan tugas liputannya di siang hari, sekaligus mendampingi reporter. Menurutnya, liputan di lapangan merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan profesi ini dengan tidak hanya mengandalkan berita siaran pers saja. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut:

Aku lihat wartawan sekarang cenderung tulis berita dari *press release* aja. Nah aku kan gemas ya baca berita mereka, ini kok nggak ada *eksplornya* sama sekali. Jadi kadang aku suka liputan juga da nada beberapa undangan yang aku tetap dampingin reporter. Saya pasti cerewet bilang kenapa kamu diam saja, harus tanya, harus deketin narasumber dan jangan hanya berdasarkan *press release* saja.

PS menyesalkan jika seorang jurnalis perempuan hanya bekerja untuk *editing* naskah berita di kantor saja lalu pulang ke rumah. Atau hanya seminggu tiga kali datang ke kantor. Bahkan ada jurnalis perempuan yang tidak mau liputan ke luar kota, hanya karena tidak diizinkan oleh suaminya. Seperti pernyataan

PS bahwa suaminya tidak mengerti mengurus anak.

Menurut pandangannya, hal tersebut menghambat karier dari perempuan tersebut karena tidak mampu berargumentasi dengan suami. Padahal suami dari rekan kerjanya tersebut juga berprofesi sebagai jurnalis. Atau bahkan, jika jurnalis perempuan tersebut lebih prioritas kepada keluarga dan tidak berupaya mengembangkan diri, antara lain dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

PS menilai dominasi laki-laki di Koran Sindo masih kuat. Hanya seorang perempuan yang belum menikah, yang dapat mengimbangi kerja jurnalistik untuk memantau berita 24 jam. Salah satunya adalah kehadiran redaktur pelaksana perempuan, HN, yang belum berkeluarga. Berikut pernyataannya: "Ya bekerja dengan detail, tegas bila ada titipan berita. Maksudnya, ini siapa atau apakah ini untuk iklan."

Kedua, RKA, kepala kompartemen *desk* metropolitan, *section* tentang Kota Surabaya, di Koran Jawa Pos. Saat ini, bertanggung jawab pada pemberitaan *section* kota Surabaya untuk halaman depan Koran Jawa Post. Selain itu, juga bertanggung jawab mengkoordinasi 12 editor dan sekitar 30 jurnalis di halaman metropolitan.

RKA menyatakan nyaman dengan profesi yang dijalannya sejak lulus kuliah pada tahun 2003. Seperti yang dituturkan RKA sebagai berikut: "Setelah dijalani ini menjadi *passion*. Rasanya bahagia sekali jika bisa menghasilkan karya jurnalis yang bagus".

Perjalanan kariernya dimulai saat menjadi jurnalis di *desk* hiburan pada tahun 2003, dan ditugaskan ke Jakarta. Lalu pada tahun 2004, menikah dan kembali ke Surabaya untuk bertugas di *desk* metropolitan. Pada tahun 2006 diangkat menjadi asisten redaktur, empat tahun kemudian menjadi redaktur, dan sejak tahun 2016 diangkat menjadi kepala kompartemen.

Menurut RKA, jurnalis perempuan di Jawa Pos dapat saja berkembang sampai ke jajaran puncak, seperti pemimpin redaksi. Perusahaan tidak bias gender dalam mengambil keputusan, melainkan penempatan seseorang atas dasar kompetensi. Adapun komposisi perempuan dan laki-laki dalam susunan keredaksian di Koran Jawa Pos saat ini adalah 30:70.

Sampai saat ini, tingkat tertinggi yang dijabat jurnalis perempuan adalah sebagai

kepala kompartemen. RKA pun belum tertarik sampai menjabat sebagai pemimpin redaksi. Hal ini diungkapkannya sebagai berikut:

Saat ini saya masih fokus dengan posisi kepala kompartemen *desk* metropolitan, *section* kota Surabaya. Sejauh ini yang saya lakukan adalah berusaha bekerja sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang sesuai.

Ketiga adalah KM, wartawan Kompas yang bekerja sejak tahun 2006. Penempatan pertamanya di Yogyakarta. KM meliput di *desk* nusantara, biro Yogyakarta. Pos liputannya di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Yogyakarta lalu Gunung Kidul. Sebelum menjadi wartawan Kompas, KM adalah wartawan Tempo, 2003-2006. Selama di Tempo, KM pernah meliput di *desk* metropolitan, nasional, dan rubrik olah raga.

Saat bergabung dengan Kompas pada tahun 2006, ia menjalani diklat selama setahun dan diangkat menjadi karyawan tetap pada Juli 2007. Sejak 2010, KM bertugas di *desk* koran minggu. Ibu dua anak ini menikmati pekerjaan yang telah dilakoninya selama 15 tahun.

Di Koran Kompas, KM adalah wartawan madya yang bertugas meliput dan melaporkan berita kepada editornya. KM menuturkan rutinitas dalam delapan tahun terakhir di *desk* koran minggu, dengan meliput berbagai macam isu: gaya hidup, budaya, musik, dan lain sebagainya. Diselingi dengan rapat *budgeting* mingguan, di awal pekan. Isu yang dibahas untuk tayang di koran dua minggu kemudian.

KM pernah bertugas sebagai pimpinan proyek untuk ekspedisi batik, pada tahun 2016. Proyek ekspedisi batik ini adalah laporan panjang yang terbit selama setahun. Setiap bulannya selalu ada liputan batik yang dihadirkan pada minggu pertama dan minggu ke empat. Selain tulisan, juga disertakan pameran batik pesisir dan bursa jualan batik.

Sejauh ini, KM belum tertarik untuk masuk ke jenjang struktural. Secara umum kata KM, tidak tampak bias gender di Kompas. Namun rerata perempuan memilih jalur profesi dibandingkan struktural dengan berbagai pertimbangan. Seperti KM, yang ketika diwawancara untuk penelitian ini, tengah hamil delapan bulan. Dalam kondisi kehamilannya, ia bisa bernegosiasi dengan atasannya untuk tidak melakukan liputan di luar kota atau luar negeri.

Berikut adalah pernyataan KM:

Aku juga sudah bilang ke editorku, selama kehamilan jangan dinas luar kota atau luar negeri dulu. Dan misalnya sudah melahirkan setelah enam bulan kalau harus dinas luar kota diajak anaknya lalu ditaruh di hotel. Kantor mengerti juga.

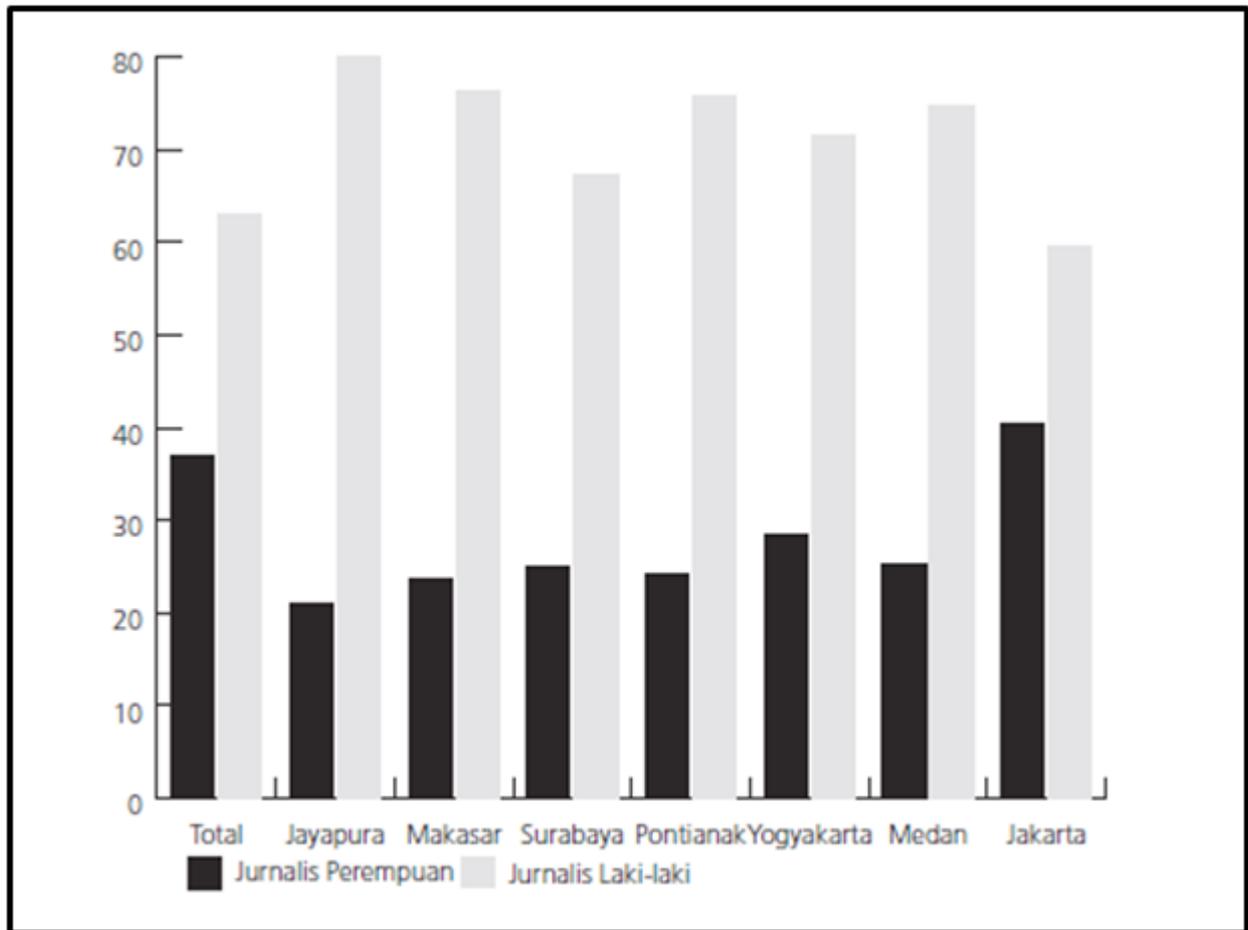
Baik PS, RKA dan KM, tidak tergabung dalam organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Forum Wartawan Jakarta atau pun Persatuan Wartawan Indonesia. PS terlibat dalam komunitas wartawan Gaya Hidup; RKA ikut dalam gerakan sosial 'Tangkis' untuk kampanye melawan kekerasan seksual terhadap anak; dan KM menjadi anggota dalam Serikat Karyawan Kompas.

Adapun organisasi wartawan secara umum dibentuk antara lain sebagai bagian dari pengembangan diri wartawan. Di dalam lembaga tersebut, terkadang diadakan pelatihan jurnalistik atau pun sejumlah gerakan untuk memperjuangkan nasib wartawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender inilah yang sering kali menimbulkan budaya ketidakadilan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk dan bidang tidak terkecuali di bidang media massa yang identik dengan dunia maskulin.

Media massa yang berkembang begitu pesat di Indonesia saat ini, dimana berdasarkan data Dewan Pers tahun 2011 diperkirakan industri media di Indonesia menyerap 40 ribu jurnalis. Akan tetapi bila kita buat perbandingannya, jurnalis perempuan lebih sedikit dibandingkan jurnalis laki-laki, yaitu sekitar 1:3 atau 1:4; atau hanya sekitar 18,6 persen jurnalis perempuan dari total 1868 anggota Aliansi Jurnalis Independen se-Indonesia dan paling banyak bekerja di media cetak (Luviana, 2012).

Media sampai saat ini masih dianggap melanggengkan stereotip yang merugikan perempuan, seperti makhluk yang pasif, tergantung pada pria dan sebagainya (Ibrahim, 2005). Bias gender dalam media massa dapat terlihat juga dari bagaimana media massa menampilkan sosok perempuan yang dimarginalkan dan disubordinasikan. Perempuan dianggap tidak dapat mengerjakan pekerjaan sebagai jurnalis bila sudah berumah tangga. Hal ini seperti yang dituturkan PS



Sumber: Luviana (2012)

Gambar 1 Perbandingan Jumlah Jurnalis perempuan dan Laki-Laki dari Media di Tujuh Kota di Indonesia

sebagai berikut: “sayang banget kariermu lagi bagus-bagusnya, kamu harus menikah dan punya anak. Kariermu tidak akan berkembang”.

Kesetaraan dan ketidakadilan jurnalis perempuan di media bisa kita lihat dari fasilitas dan kesempatan yang diberikan oleh pihak media, seperti dari segi tunjangan, waktu kerja serta fasilitas. Bila dilihat dari gaji yang diterima, ketiga narasumber dari tiga media menyatakan bahwa tidak ada perbedaan gaji karena perbedaan gender. Baik jurnalis perempuan maupun laki-laki menerima gaji yang sama sesuai posisi mereka. Demikian pula dengan jam kerja, yang disesuaikan dengan *desk* yang ditanganinya. Untuk *desk* nasional tentunya seorang jurnalis dituntut untuk dapat mendedikasikan waktunya hampir 24 jam. Baik jurnalis perempuan maupun laki-laki.

Akan tetapi dengan perbedaan tuntutan waktu berkaitan dengan *desk* yang ditangani ini, secara tidak langsung membuat jurnalis perempuan yang sudah berkeluarga mundur secara teratur dari *desk* nasional karena harus

menyesuaikan waktu dan prioritas keluarga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati yang menyatakan bahwa perempuan pekerja media di Jawa Barat akan memilih berhenti bekerja jika terjadi benturan antara mengasuh anak dengan bekerja di kantor (Herawati, 2016). Tentunya hal ini tidak perlu disesalkan oleh perempuan, karena tidak bertujuan menjadi seorang yang maskulin tetapi berguna bagi keluarga dan sanggup berkiprah di masyarakat.

Perbedaan baru terlihat jelas bila dihadapkan pada aspek tunjangan dan fasilitas kesehatan. Jurnalis perempuan tidak dianggap sebagai kepala keluarga, sehingga fasilitas kesehatan ataupun asuransi yang diberikan berbeda dengan jurnalis laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan KM sebagai berikut:

Perbedaannya di klaim kesehatan. Untuk tunjangan aku dapat untuk dua anak. Di kantor suami, bila istri sakit maka bisa diklaim. Tetapi bila suami yang sakit,

aku tidak bisa klaim di kantorku. Ya bayar sendiri.

Kebijakan yang berbeda ditemui di perusahaan media yang berbeda. Jurnalis perempuan di Koran Sindo walaupun sudah berkeluarga tetap dikategorikan *single* untuk fasilitas kesehatan dan tunjangannya. Hal yang berbeda untuk jurnalis laki-lakinya, yang mendapatkan tunjangan dan fasilitas kesehatan untuk istri dan dua anak.

Berkaitan dengan biaya persalinan untuk jurnalis perempuan di Kompas dan Sindo mendapatkan fasilitas tersebut. Berbeda dengan Jawa Pos yang tidak memberikan biaya persalinan dengan anggapan menghapuskan hal-hal yang berkaitan dengan gender, untuk menunjukkan adanya kesetaraan antara jurnalis perempuan dan laki-laki.

Kesempatan jurnalis perempuan di media khususnya dalam penelitian ini adalah media cetak, di jenjang redaksional juga belum menunjukkan angka yang kompetitif dengan para jurnalis laki-laki. Ketiga media yang menjadi tempat bekerja para narasumber, jajaran redaksional di dominasi jurnalis laki-laki.

Di Kompas, sampai saat ini belum pernah ada jurnalis perempuan yang menduduki posisi pimpinan redaksi. Sedangkan di Sindo, komposisi jajaran redaksional ataupun pimpinan redaksi juga didominasi jurnalis laki-laki dengan komposisi 90% laki-laki dan 10% perempuan. Baik pimpinan redaksi maupun wakil pimpinan redaksi dipegang oleh jurnalis laki-laki. Jurnalis perempuan baru terlihat di posisi di redaktur pelaksana. Hal yang sama terlihat juga pada gambaran jajaran redaksional di Koran Jawa Pos. Sesuai pernyataan RKA sebagai berikut:

sejauh ini belum ada jurnalis perempuan yang sampai ke *top level* seperti pimpinan redaksi. *Level* tertinggi yang dicapai perempuan di Jawa Pos untuk bagian redaksi baru kepala kompartemen.

Berbagai pertimbangan diberikan untuk menjadi alasan masih mendominasinya jurnalis laki-laki berada di jajaran redaksional. Seperti kesediaan waktu dan tenaga. Tertanam di benak para pekerja media ini bahwa para jurnalis laki-laki dianggap dapat lebih mendedikasikan waktunya secara total dari pagi hingga tengah malam untuk keperluan pekerjaan dan

redaksional, yang tidak hanya memikirkan dari segi redaksi berita tetapi juga profitabilitas media. Berbeda dengan jurnalis perempuan yang dianggap totalitas untuk pekerjaannya berbeda dari segi waktu dan tenaga. Masih kuatnya anggapan bahwa jurnalis perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, waktu yang didedikasikan ke pekerjaan akan sangat terbatas dan sudah tidak mau berkembang lagi. Selain itu masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat untuk perempuan yang berada di luar rumah sampai larut malam dan dianggap tidak aman.

Dari ketimpangan jumlah jurnalis perempuan dibandingkan laki-laki inilah memunculkan kesan bahwa dunia media dan profesi jurnalistik adalah dunianya kaum laki-laki karena kuasa dan kontrol laki-laki atas media lebih dominan. Media seolah tidak memberikan ruang secara adil terhadap kaum perempuan karena kuasa patriarki di dalamnya.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Herawati, perempuan pekerja media memaknai dirinya, yaitu: sebagai perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki tetapi tidak dimaknai negatif, 2) perempuan yang sama dan setara bahkan dengan laki-laki, 3) perempuan yang diperlakukan adil dalam keluarga dan sekolah, 4) lebih kuat atau memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki di sekitarnya, 5) tugas mengasuh anak adalah tugas perempuan dan 6) jika terjadi benturan antara mengasuh anak dengan bekerja di kantor, perempuan memilih berhenti bekerja (Herawati, 2016).

Bila dikaitkan dengan *muted group theory* atau teori kelompok bungkam, yang melihat bagaimana praktik komunikasi kelompok dominan dapat menindas, membungkam atau mendevalusi kata, ide dan suara dari kelompok subordinat atau luar; jurnalis perempuan mengalami proses pembungkaman melalui ritual atau kebiasaan sosial dan kontrol media. Melalui ritual atau kebiasaan yang dilakukan dan stereotip yang tertanam di lingkungan sosial bahwa perempuan adalah bawahan laki-laki, banyak prioritas waktu yang diberikan untuk keluarga dan sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh PS sebagai berikut:

Rata-rata wartawan perempuan di Sindo yang sudah menikah dan punya anak lebih mengarah ke *desk non nasional*, seperti *desk lifestyle*, ekonomi ataupun olahraga. Karena kalau di nasional, beritanya lebih

banyak yang fluktuatif dan banyak yang harus *update*. Apalagi kalau bertugas di KPK, harus siap 24 jam. Karena ini termasuk berita yang dianggap seksi, yang ada di halaman satu. Walaupun tetap ada juga jurnalis perempuan di nasional, tetapi lebih ke kementerian kesehatan. Sehingga kita bisa mengukur waktu kapan kita pulang dan berangkat kerja.

Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung stereotip yang tertanam di lingkungan sosial mengenai perempuan diikuti oleh perempuan tidak terkecuali oleh para jurnalis perempuan ini yaitu bila sudah menikah dan mempunyai anak, perlu waktu yang cukup untuk mengurus keluarga dan anak. Sistem sosial suatu masyarakatlah yang membentuk pola hubungan gender di dalamnya yang membungkam jurnalis perempuan ini untuk berkarir (Mustikawati, 2015).

Pembungkaman jurnalis perempuan dapat terlihat juga di media bila kita kaitkan dengan kontrol media. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana media dikendalikan oleh laki-laki dari segi pemimpin media dan pengambil keputusan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan di Inggris dan Republik Irlandia menyatakan bahwa pengambilan keputusan di ruang redaksi mengenai apa yang layak diberitakan condong berdasarkan berita yang bernilai maskulin. Isu dan topik yang dianggap relevan bagi perempuan cenderung dianggap kurang penting. Berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa kendali laki-laki di media masih begitu besar dibandingkan perempuan (Ross & Carter, 2011).

Media di Indonesia khususnya Koran Sindo menurut PS, laki-laki dan perempuan di jajaran struktural atau pimpinan redaksi memiliki komposisi 90 persen laki-laki dan 10 persen perempuan. Berbeda dengan Koran Jawa Pos yang sampai saat ini belum ada perempuan yang sampai ke jajaran puncak seperti pemimpin redaksi; demikian juga di Koran Kompas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh KM sebagai berikut: "Pemred di sini belum pernah perempuan. Kalau Wapemrednya ada perempuan, Mba Ninuk Pambudi. Kalau Kepala *Desk* rata-rata sih banyak perempuan juga".

Berdasarkan hasil penelitian, suatu hal yang menarik terlihat bahwa sebenarnya perempuan juga membungkam dirinya sendiri secara tidak

sadar. Stereotip yang tertanam di lingkungan sosial serta kontrol yang umumnya dipegang oleh laki-laki di media, mengakibatkan jurnalis perempuan membuat dirinya terbungkam sendiri, dengan tidak mau menduduki jajaran struktural karena waktu yang diperlukan untuk keluarga ataupun tidak mau dibebani urusan bisnis media. Selain itu ada anggapan bahwa dengan berada di *level* struktural maka banyak pihak-pihak yang mengintervensi kerja jurnalistiknya. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh ketiga narasumber, antara lain sebagai berikut:

Tidak tertarik untuk sampai di *level* tertinggi karena masih fokus dengan posisi saat ini. Selain itu di struktural banyak yang diurusinya, karena tidak hanya mengurus tulisannya saja tetapi juga mengurus bisnisnya dan sebagainya.

Para jurnalis perempuan ini untuk menyeimbangkan dan menyetarakan ketimpangan dan ketidakadilan yang ada, tidak perlu merasa takut untuk bersuara. Mereka menyuarkan aspirasi akan fasilitas-fasilitas yang harusnya didapatkannya; misalnya saja di organisasi Koran Kompas dengan adanya serikat karyawan yang menyuarkan aspirasi karyawannya tidak terkecuali para jurnalis perempuannya. Tentunya dengan masuk dalam organisasi jurnalis, maka perempuan dapat membangun organisasi jurnalis yang berperspektif perempuan.

Seperti yang dikemukakan oleh West & Turner, agar dapat berpartisipasi di masyarakat, maka perempuan harus dapat mengubah perspektif sesuai dengan sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki (West & Turner, 2008). Dalam hal ini perempuan harus responsif untuk mengekspresikan dirinya.

SIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jurnalis laki-laki masih dominan dibandingkan jurnalis perempuan di sektor media, khususnya media cetak surat kabar. Jurnalis perempuan pun masih sedikit yang berhasil berada di posisi puncak struktur redaksi. Karena posisi pemimpin redaksi masih diduduki oleh jurnalis laki-laki.

Meskipun dalam sistem penggajian, perempuan yang menduduki posisi yang sama

dengan jurnalis laki-laki tidak mengalami diskriminasi, tetapi dalam hal fasilitas pekerjaan masih dijumpai perbedaan perlakuan. Antara lain untuk tunjangan persalinan dan biaya kesehatan (suami atau anak-anak). Jurnalis perempuan yang sudah menikah masih dianggap berstatus lajang atau *single*. Pun dengan belum tersedianya ruang laktasi di tempat kerja.

Pengotakan *desk* atau area liputan yang dianggap lebih ‘seksi’ ditujukan untuk jurnalis laki-laki secara tidak langsung menunjukkan bias gender atau ketidaksetaraan. Alasannya, laki-laki dapat mencurahkan waktu dan tenaganya dibandingkan perempuan. Karena jurnalis perempuan, khususnya yang sudah menikah dianggap waktu dan tenaganya akan tersita untuk urusan domestik.

Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi penilaian terhadap kinerja jurnalis perempuan. Terutama setelah dia menikah dan membina keluarga. Ada anggapan bahwa waktu dan tenaganya akan tersita untuk mengurus anak dan suami, yang kemudian berdampak kepada kompetisi kerja menuju jajaran puncak di keredaksian.

Budaya patriarki yang masih tertanam lekat membuat para jurnalis perempuan terutama yang telah menikah kehilangan semangat dan profesionalismenya untuk menuju jajaran puncak keredaksian. Karena lingkungan keluarga inti, yang terkadang mengkhawatirkan kerja jurnalis yang menuntutnya untuk siaga 24 jam sesuai dengan sifat berita. Jam kerja inilah yang membuat perempuan khususnya jurnalis perempuan yang sudah berumah tangga tidak setara dengan laki-laki.

Walhasil, perempuan lebih memilih bekerja di *desk* tertentu, misalnya gaya hidup, olah raga dan sebagainya; sambil membagi waktu dan tenaganya untuk membina keluarga. Perempuan ingin berkarir tanpa melupakan tugas-tugas domestiknya. Sayangnya apresiasi ini dianggap masih belum maksimal di dunia keredaksian yang didominasi laki-laki yang di dalam budaya patriarki tidak bertugas untuk mengurus anak. Maka perlu adanya perubahan persepsi dari jurnalis perempuan sendiri bahwa bekerja di *desk* seperti gaya hidup, olah raga dan sebagainya; juga sama hebatnya dengan pekerjaan jurnalis laki-laki yang bekerja di *desk* lingkup nasional maupun internasional yang selalu ada di halaman depan media.

Secara tidak sadar, perempuan sendiri

sebenarnya membungkam dirinya karena ada label ataupun stereotip yang tertanam di lingkungan sosial mengenai perempuan serta kontrol yang dilakukan di lingkup media khususnya media cetak. Ini sejalan dengan *muted theory group* atau teori kelompok bungkam, bahwa jurnalis perempuan mengalami proses pembungkaman melalui ritual atau kebiasaan sosial dan kontrol media.

Melalui ritual atau kebiasaan yang dilakukan dan stereotip yang tertanam di lingkungan sosial bahwa perempuan adalah bawahan laki-laki, banyak prioritas waktu yang diberikan untuk keluarga dan sebagainya. Bahwa faktanya ada jurnalis yang tidak mau dibebani dengan urusan bisnis media melainkan hanya menjalankan tugas jurnalistiknya.

Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini, diharapkan semakin gencar gerakan-gerakan memperjuangkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sektor media melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil jurnalis perempuan ataupun ikut aktif terlibat dalam serikat pekerja maupun organisasi wartawan. Selain itu perlu ditingkatkannya karya jurnalistik berperspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenia, P. (2017, March 14). *Stop kekerasan seksual, penuhi hak jurnalis perempuan di ruang kerja*. Diakses dari <https://aji.or.id/read/berita/622/stop-kekerasan-seksual-penuhi-hak-jurnalis-perempuan-di-ruang-kerja.html> .
- Bachyul, S., Saputra R., & Khagen, A. (2013). *Memahami hukum pers*. Padang: LBH Pers Padang & Yayasan Tifa.
- Byerly, C.M. (2011). Behind the scenes of women’s broadcast ownership. *Howard Journal of Communication Volume 22, 2011-Issue 1*. 24-42. doi: <https://doi.org/10.1080/10646175.2011.546740>.
- Cresswell, J.W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gumelar, R., & Mukhroman, I. (2015). Tato: representatif gender dalam perspektif feminisme. *Jurnal Kajian Komunikasi*,

- 3(1), 71-80. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/jkk.v3i1.7396>.
- Herawati, M. (2016). Pemaknaan gender perempuan pekerja media. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 85-95. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/jkk.v4i1.7851>.
- Hidajadi, M. (2003). Hubungan ibu dan anak perempuan: Sebuah distorsi?. *Jurnal Perempuan* 16, 7-15.
- Ibrahim, I.S. (2005). *Lifestyle ectasy: kebudayaan pop dalam masyarakat komoditas Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra
- Julikawati, P. E. (2016, April 21). *Jurnalis perempuan masih alami diskriminasi*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/21/058764744/jurnalis-perempuan-masih-alami-diskriminasi>.
- Komala, R. (2018). Perlindungan terhadap wartawan: pekerjaan rumah tanpa akhir. *Jurnal Dewan Pers Edisi 17 Juli 2018*. Diakses dari https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200527_Jurnal_Dewan_Pers_edisi17.pdf.
- Lampe, I. (2010). Perempuan dalam pengelolaan surat kabar di Sulawesi Tengah (studi posisi dan peran perempuan dalam media cetak). *Academica-Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untad. Vol 02 No.01 Februari 2010*. Diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2322>.
- Littlejohn, S. W. & Foss, K.A. (2016). *Ensiklopedia teori komunikasi jilid 2*, edisi terjemahan. Penerjemah: Tri Wibowo BS. Jakarta: Kencana.
- Luviana. (2012). *Jejak jurnalis perempuan: pemetaan kondisi kerja jurnalis perempuan di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- World press freedom day 2017. (2017). Jakarta: Unesco & Dewan Pers.
- Mustikawati, C. (2015). Pemahaman emansipasi wanita. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 65-70. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/jkk.v3i1.7395>.
- Neuman, W.L. (2013). *Metode penelitian sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif edisi 7*. Jakarta: Indeks.
- Ritonga, R, Muwarni, E. & Ritonga, S. (2017). Gender awareness of Maria Hartiningsih as daily Kompas reporter. *Jurnal Komunikasi ISKI, Vol. II (02), 2017*. 82-91. doi: <http://dx.doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.102>.
- Ross, K, & Carter, C. (2011). Women & news: a long and winding road. *Media Culture & Society Journal Volume 33 2011-Issue 8*. 1148-1165. doi:<https://doi.org/10.1177/01634437111418272>.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian bisnis-pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- West, R. & Turner, L.H. (2008). *Pengantar teori komunikasi: analisis dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winarti, A. (2005). Perjalanan perempuan jurnalis Kompas Maria Hartiningsih. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Volume IV/No.3*. 27-55.
- Wulandari, C.R. (2016, March 9). *Pekerja perempuan di media massa masih banyak alami diskriminasi*. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/03/09/363675/pekerja-perempuan-di-media-massa-masih-banyak-alami-diskriminasi>.